OMBUDSMAN SIMULASI KEPATUHAN LAYANAN DI DPMPTSP KOTA PARIAMAN

Jum'at, 13 April 2018 - Nurul Istiamuji

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat melakukan simulasi penilaian kepatuhan pada DPMPTSP Kota Pariaman, Jumat (13/4/2018).

Plt. Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi beserta tim mengunjungi Kota Pariaman melihat kesiapan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2018.

"Dari sembilan daerah yang akan dinilai tahun 2018, Pariaman merupakan daerah terakhir yang kita tinjau persiapan dalam mengikuti kepatuhan," kata Adel.

Adapun tujuannya, Ombudsman ingin melihat respon dan komitmen kepala daerah dalam menindaklanjuti penilaian kepatuhan di tahun 2018. "Seberapa besar kemauan dan dorongan kepala daerah kepada pimpinan organisasi perangkat daerahnya," jelas Adel.

Simulasi penilaian kepatuhan ini diterima oleh Sekdako Pariaman Indra Sakti. Indra mengaku dengan senang hati menerima kunjungan Ombudsman. "Kami berupaya agar Kota Pariaman pada tahun 2018 ini masuk dalam zona hijau," kata Indra.

Sementara itu, Asisten Ombudsman RI Yunesa Rahman menyampaikan, pada simulasi yang dilakukan, masih ada kekurangan terkait informasi waktu dan biaya layanan dari 104 urusan yang dilayani oleh DPMPTSP Pariaman.

"Setelah kami tinjau perlu jadi catatan pemerintah Kota Pariaman, beberapa urusan yang tidak mungkin dilimpahkan kewenangannya ke DPMPTSP seperti urusan KIR, sertifikasi guru, rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh dinas terkait, kemungkinan kantornya akan dinilai, biasanya dinas-dinas tersebut yang merusak nilai kepatuhan daerah nantinya," kata Yunes.